

**PENGUSAHA DAN POLITIK :  
KETERLIBATAN PENGUSAHA DALAM DUNIA POLITIK DI  
SUMATERA BARAT 1999 – 2009**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Panitia Ujian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas  
sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Sejarah*

**Oleh:**

**DODI SUPRIHANTO**  
**05 181 010**



**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang keberadaan pengusaha dalam dunia politik praktis di Sumatera Barat. Banyak pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, seperti kenapa Asli Chaidir, Djonimar Boer, Leonardy dan banyak lainnya yang memiliki latar belakang pengusaha bisa menjadi ketua partai. Apakah mereka memiliki kapasitas sebagai pemimpin, atau karena kekayaan yang dimilikinya membuat mereka bisa membeli suara dalam pemilihan ketua partai.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah keberadaan pengusaha dalam dunia politik sejak masa reformasi. Gejala ini terasa semakin kuat, ditandai dengan banyak pengusaha yang terlibat dalam politik. Kondisi ini didukung pula dengan semakin terbukanya kesempatan dengan jumlah partai yang banyak.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Hal pokok dari metode ini adalah wawancara mendalam dengan informan yang akan diteliti. Beberapa anggota dewan yang diteliti terutama berasal dari latar belakang pengusaha seperti Djonimar Boer, Syukriadi Syukur, Suwirpen Suib. Periodeisasi yang kontemporer dari skripsi ini, mengharuskan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi lapangan. Hal ini dilakukan dengan serangkaian wawancara yang mendalam terhadap pokok permasalahan yang diteliti, khususnya wawancara dengan politisi yang berasal dari pengusaha. Selain itu, studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dari penelitian skripsi ini.

Hubungan Pengusaha dengan dunia politik bukanlah sebuah hal yang baru dan pertama kali terjadi di Indonesia. Hal ini sudah berlangsung sejak Orde Lama hingga saat sekarang ini. Tidak hanya di pusat, hubungan antara pengusaha dengan dunia politik juga merambah sampai ke daerah-daerah, termasuk di Sumatera Barat. Semenjak Orde Baru berkuasa, pengusaha telah mewarnai kehidupan politik di Sumatera Barat. Pengusaha yang ada pada waktu itu lebih banyak berada dalam Partai Golkar, walaupun ada yang bergabung dalam partai lain, mereka kebanyakan tidak berani “menampakan muka” pada saat itu.

Setelah tumbang rezim Orde Baru, pengusaha yang ada di Sumatera Barat tidak hanya berada dalam tubuh Partai Golkar saja, tetapi juga mengisi struktur kepengurusan partai-partai politik yang lain. Mahalnya ongkos sistem pemilihan langsung dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kepengurusan partai, membuat partai tidak bisa menafikan kehadiran pengusaha tersebut. Keberadaan mereka dalam suatu partai politik kemudian mewarnai dinamika politik di daerah Sumatera Barat, baik dalam pemilu maupun dalam pemilihan kepala daerah. Latar belakang masuknya pengusaha untuk terjun ke dalam dunia politik di Sumatera Barat dapat dilihat dari profil singkat beberapa pengusaha yang mengisi jabatan dalam struktur kepengurusan partai dan menjadi anggota legislatif di DPRD Sumatera Barat. Dari sanalah kemudian dapat diambil kesimpulan, bahwa pengusaha yang terjun ke kancah politik di Sumatera Barat dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, yaitu untuk menyelematkan dan mengembangkan kepentingan bisnis mereka.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara dunia usaha dengan dunia politik bukanlah hal yang baru dan pertama kali terjadi di Indonesia. Sejarah mencatat, kerjasama antara pengusaha dengan penguasa di negeri ini telah menghasilkan kebijakan yang di antaranya adalah dorongan atas pertumbuhan dunia usaha pribumi yang tercermin dalam kebijakan Ali Baba atau Baba Ali pada tahun 1950-an.<sup>1</sup> Yahya Muhaimin menyebutnya sebagai *Client Businessmen*, dimana pengusaha-pengusaha bekerja dengan dukungan dan proteksi dari jaringan kekuasaan pemerintahan.<sup>2</sup>

Para pengusaha mempunyai *patron* dalam kelompok kekuasaan politik-birokrasi dan mereka sangat tergantung kepada konsesi dan monopoli yang diberikan oleh pemerintah. Mereka lahir di luar aparat birokrasi dan biasanya juga masih termasuk ke dalam keluarga elit yang sedang berkuasa.<sup>3</sup> Arief Budiman menyebut pola hubungan ini sebagai sebuah hasil dari perkembangan "kapitalisme semu" yaitu adanya campur tangan pemerintah yang terlalu banyak sehingga mengganggu prinsip persaingan bebas dan membuat dunia usaha Indonesia menjadi tidak dinamis. Kondisi ini semakin diperburuk oleh perkembangan dunia usaha Indonesia yang tidak didasarkan pada perkembangan teknologi yang

---

<sup>1</sup> Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik* (Jakarta: LP3S, 1991), hlm. 152.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

memadai, akibatnya tidak terjadi industrilisasi yang mandiri.<sup>4</sup> Ikatan *patron* dan *client* ini semakin kuat dengan bergabungnya para pengusaha tersebut dalam partai berkuasa, terutama pada masa rezim Orde Baru. Pada umumnya para pengusaha itu bergabung dalam partai Golongan Karya (Golkar) yang merupakan partai pemerintah dan berkuasa.<sup>5</sup> Siti Hardianti Rukmana, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla adalah beberapa nama yang tergabung dalam partai yang berlambang pohon beringin tersebut.

Pasca tumbangnya Rezim Orde Baru, sistem politik Indonesia mengalami perubahan. Pemberlakuan UU No. 2 Tahun 1999<sup>6</sup> membuat Indonesia mulai menerapkan sistem multi partai. Sistem ini telah mendorong tumbuhnya partai-partai di luar partai yang telah ada sebelumnya seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terdapat 48 partai yang bersaing dalam perebutan kekuasaan pada pemilu 1999, di antaranya Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sistem multi partai ini juga mengharuskan setiap partai untuk menghidupi diri sendiri. Kekuatan finansial partai menjadi salah satu penentu kekuatan partai bersaing memperebutkan kekuasaan di parlemen yang selanjutnya berdampak pada "bargaining" bagi penempatan orang-orang partai di legislatif. Salah satu akses bagi kekuatan finansial itu didapatkan dari para pengusaha.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (Jakarta: LP3S, 1991), hlm. Xiv.

<sup>5</sup> Aries Kelana dan Rohmat Haryadi, *Yang Makmur Di Pentas Politik* ([www.gatra.com/22 januari 2002](http://www.gatra.com/22-januari-2002)), diunduh dari ([www.gatra.com/17 februari 2010](http://www.gatra.com/17-februari-2010)).

<sup>6</sup> Kutipan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, diunduh dari ([www.tempointeraktif.com/26 maret 2004](http://www.tempointeraktif.com/26-maret-2004)), tanggal 15 Juni 2010.

<sup>7</sup> Aries Kelana, *op. cit*, hlm.1.

Sistim multipartai ini telah membuka peluang yang sangat luas bagi para pengusaha untuk terjun dan berkiprah di dunia politik. Budaya *patron* dan *client* yang telah terbentuk membuat pengusaha dan politikus mencari jalan untuk saling mendukung pada pengusahaan atas politik dan dunia usaha. Keterlibatan para pengusaha pada partai politik tidak lagi terkonsentrasi pada satu partai saja tetapi menyebar pada banyak partai lainnya. Contohnya dalam Partai Amanat Nasional, Soetrisno Bachir dan Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Soetrisno berasal dari Pekalongan dan berlatar belakang pengusaha batik dan Zulkifli Hasan merupakan pengusaha asal Lampung. Dalam jajaran kepemimpinan Partai PDI-Perjuangan, jabatan Sekjen diduduki oleh Pramono Anung yang merupakan pengusaha pertambangan.<sup>8</sup>

*Trend* pengusaha menduduki jabatan-jabatan strategis dalam partai politik tidak hanya pada tingkat nasional saja, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah. Salah satu daerah tersebut adalah Sumatera Barat. Nama-nama seperti Asli Chaidir, Djonimar Boer, Leonardy Harmainy dan Amran Nur adalah politikus yang mempunyai latar belakang sebagai pengusaha. *Trend* ini juga didorong oleh pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang memberi ruang yang luas bagi hubungan timbal balik antara kepentingan pengusaha dan penguasa di daerah.<sup>9</sup>

Untuk kasus Sumatera Barat, Israr Iskandar menyebutkan bahwa pengusaha di daerah ini membangun akses ke sumber kekuasaan atau terjun langsung ke

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Kutipan Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *diunduh* dari (<http://www.unisosdem.org/otonomi/uu22-penjelasan.htm/10> mei 2010), tanggal 15 Juni 2010.

dalam aktivitas politik untuk kepentingan bisnis mereka.<sup>10</sup> Bukan hal yang aneh jika banyak proyek pembangunan dikerjakan oleh pengusaha yang memiliki akses pada sumber kekuasaan baik politik maupun ekonomi.<sup>11</sup>

Ada beberapa buah buku dan artikel yang membahas kiprah para pengusaha di dunia politik Indonesia, di antaranya adalah *Bisnis Dan Politik* yang ditulis oleh Yahya Muhaimin. Buku ini menjelaskan tentang "perselingkuhan" antara penguasa dengan pengusaha sebagai dampak dari pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia dari awal kemerdekaan sampai masa Orde Baru.<sup>12</sup>

Untuk kasus Sumatera Barat dibicarakan dalam buku *Elit Lokal Pemerintah dan Modal Asing, Kasus Gerakan Menuntut Spin-Off PT Semen Padang dari PT Semen Gresik Tbk (1999-2003)* yang ditulis oleh Israr Iskandar. Buku ini menjelaskan adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah lokal dalam hal ini Pemerintah Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat dan modal asing menyangkut masalah *spin-off* PT Semen Padang dari PT Semen Gresik. Israr juga memaparkan begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi ketika gerakan *spin-off* ini mulai diperjuangkan. Kondisi ini semakin diperparah ketika elit-elit lokal yang berjuang atas nama kepentingan daerah, juga ikut "bermain" dalam rangka menyelamatkan kepentingan bisnis mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Israr Iskandar, *Elit Lokal Pemerintah dan Modal Asing, Kasus Gerakan Menuntut Spin-Off PT. Semen Padang dari PT. Semen Gresik Tbk 1999-2003* (Jakarta: SAD Satria Bhakti, 2007), hlm. 39.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>12</sup> Yahya Muhaimin, *op. cit.*

<sup>13</sup> Israr Iskandar, *op. cit.*

Tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang membahas tentang kiprah para pengusaha di dunia politik khususnya di daerah Sumatera Barat belum begitu banyak. Kalau pun ada, tulisan-tulisan tersebut hanya berupa artikel yang dimuat di media massa lokal dan nasional. Contohnya, opini yang ditulis oleh Pangi Syarwi di salah satu media lokal Sumatera Barat yang berjudul Rekam Jejak Pilkada di Indonesia. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa pemilihan langsung kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif tidak terlepas dari politik "dagang sapi" dan sarat dengan *money politics*. Pemilihan langsung yang diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas serta dapat melaksanakan amanah rakyat justru semakin menyuburkan praktek KKN di daerah.<sup>14</sup>

Tema ini menarik didalami lebih jauh karena belum ada kajian tentang pengusaha-pengusaha yang terjun ke dunia politik di Sumatera Barat. Penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan tentang latar belakang yang mempengaruhi para pengusaha tersebut untuk terjun ke dunia politik. Karakteristik dan gaya kepemimpinan politikus yang berasal dari kalangan pengusaha serta peranan pengusaha dalam memajukan partai politik secara khusus maupun memajukan daerah secara umum. Untuk mencapai harapan tersebut, maka penulisan skripsi ini diberi judul "Keterlibatan Pengusaha dalam Dunia Politik di Sumatera Barat Tahun 1999-2009".

---

<sup>14</sup> Pangi Syarwi, *Jejak Rekam Pilkada di Indonesia*, dimuat dalam Surat Kabar Singgalang, 28 Januari 2008.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Penulisan ini berjudul “Keterlibatan Pengusaha dalam Dunia Politik di Sumatera Barat Tahun 1999-2009”, guna melihat keterlibatan pengusaha dalam perpolitikan di Sumatera Barat serta motivasi atau yang melatarbelakangi pengusaha terjun ke dunia politik. Batasan temporal penelitian mencakup tahun 1999 sampai tahun 2009. Tahun 1999 dipilih sebagai batasan awal dari penelitian karena pada tahun ini dilaksanakan pemilu pertama pasca runtuhnya Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto.

Runtuhnya rezim Orde Baru membuat demokrasi di Indonesia jauh lebih baik. Hal ini kemudian dapat dilihat ketika pada pemilu 1999, Indonesia kembali menerapkan sistim multi partai serta adanya larangan bagi PNS untuk terjun langsung ke dunia politik dan penghapusan dwi fungsi ABRI. Kondisi ini kemudian membuka peluang bagi para pengusaha untuk terjun dan berkiprah di dunia politik secara terang-terangan.

Sedangkan tahun 2009 dipilih guna melihat perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun pasca pemilu 1999. Pada tahun ini juga sistem pelaksanaan pemilu mengalami perubahan yang secara tidak langsung mempengaruhi hasil pemilu. Konstantan yang memenangi pemilu adalah konstantan yang mempunyai dana yang cukup besar di samping mempunyai strategi yang bagus untuk memenangi pemilu. Penulis juga melihat dalam rentan tahun 1999-2009, struktur kepengurusan beberapa partai politik diduduki oleh kalangan pengusaha di Sumatera Barat.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini dapat dirumuskan melalui pertanyaan berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi para pengusaha yang ada di Sumatera Barat untuk terjun ke dunia politik pada masa Reformasi ?
2. Bagaimanakah situasi ekonomi dan politik Sumatera Barat pada masa Orde Baru?
3. Bagaimanakah situasi ekonomi dan politik Sumatera Barat pada masa Reformasi sehingga pengusaha berminat untuk terjun ke dunia politik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Latar belakang yang mempengaruhi para pengusaha untuk ikut aktif dalam perpolitikan di Sumatera Barat
2. Situasi ekonomi dan politik Sumatera Barat pada masa Orde Baru
3. Situasi ekonomi dan politik Sumatera Barat pada masa Reformasi sehingga pengusaha berminat terjun ke dunia politik

#### **D. Kerangka Analisis**

Tulisan yang berjudul “Keterlibatan Pengusaha dalam Dunia Politik Di Sumatera Barat Tahun 1999-2009” ini merupakan kajian sejarah lokal yang ditujukan untuk melihat struktur dan proses tindakan atau interaksi manusia yang terjadi dalam konteks sosio-kultural di masa lampau dan dapat diungkapkan secara holistik dalam berbagai pendekatan seperti pendekatan politik ataupun ekonomi yang terjadi pada suatu lokalitas tertentu.<sup>15</sup> Batasan tentang lokalitas ini ditegaskan oleh Taufik Abdullah sebagai "sejarah dari suatu tempat", yang batasannya ditentukan oleh penulis sesuai dengan konteks peristiwa di masa lalu.<sup>16</sup>

Konteks peristiwa masa lalu dalam tulisan ini menggunakan pendekatan politik untuk melihat gejala-gejala yang ada di masyarakat, seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsensus, rekrutmen dan perilaku kepemimpinan, massa dan pemilih, budaya politik serta sosialisasi politik.<sup>17</sup>

Keterlibatan pengusaha dalam dunia politik sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Elit pengusaha di Indonesia kadang berfungsi sebagai penguasa. Pemerintahan maupun keraton pada waktu dulu sesungguhnya sangat akrab bersentuhan dengan dunia usaha, sehingga di antara keduanya ibarat sekeping mata uang saja. Satu sisi adalah penguasa dan pada sisi

---

<sup>15</sup> Lihat Hecht, J.Jean, (*International Encyclopedia of the Social Sciences*, 1968).

<sup>16</sup> Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.15.

<sup>17</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003), hlm.173.

lain adalah pengusaha. Hubungan yang begitu erat antara dunia usaha dengan kekuasaan menjadikan kelompok ini sebagai kelas menengah yang mandiri dan faktor perubahan tidak dapat diharapkan, karena mereka berada dalam kelompok yang sama. Ketidakmandirian dunia usaha di Indonesia dapat dilihat dalam sejarah ekonomi Indonesia. Kekuasaan para pejabat birokrasi mempermudah para pengusaha mendapatkan surat istimewa atau *kattabeletje* yang digunakan untuk memperoleh lisensi dari pemerintah. Hal itu memperlihatkan hubungan timbal balik antara penguasa dengan pengusaha.<sup>18</sup>

Yoshihara Kunio dalam bukunya yang berjudul *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara* berpendapat, bahwa kedua kelompok itu (pengusaha dan penguasa) memiliki ketergantungan satu sama lain. Para pengusaha di Indonesia tidak mandiri dan takut bersaing dengan kompetitornya tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Kunio juga menambahkan, para pengusaha tersebut kebanyakan hanyalah pemburu rente yang mencari keuntungan dari proyek-proyek pemerintah.<sup>19</sup>

Kondisi demikian menyebabkan kapitalisme yang berkembang di Indonesia hanya bersifat semu dan tidak mengacu pada perkembangan kapitalisme murni yang terjadi di negara-negara lain. Jepang misalnya, para kapitalis di sana lebih banyak melakukan inovasi dan adanya persaingan yang terbuka antara satu sama lain. Berbeda dengan Indonesia, perkembangan kapital sebagian besar terbatas di sektor tersier dan dikuasai oleh modal asing, terutama China. Meskipun hal ini

---

<sup>18</sup> Yahya Muhaimin, *op. cit.*

<sup>19</sup> Yoshihara Kunio, *op. cit.*

tidak begitu tepat, di bawah berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong kewirausahaan bumi putera, namun para kapitalis China masih tetap dominan memegang kendali yang sesungguhnya atas perkembangan kapitalisme.<sup>20</sup>

Jika pada masa pemerintahan Sukarno, politik dianggap sebagai panglima karena kegiatan politik lebih penting ketimbang kegiatan ekonomi. Pada Orde Baru, jargon atau istilah tersebut kemudian diganti dengan “ekonomi sebagai panglima”. Hal ini disebabkan karena pemerintah Orde Baru menganggap perkembangan politik pada masa Orde Lama telah menyebabkan kehancuran di bidang ekonomi, maka kegiatan politik direduksi dan ekonomi mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan “pembangunan” menjadi kosakata resmi dari pemerintahan Orde Baru.<sup>21</sup>

Pemerintahan Orde Baru diwarnai oleh tiga fenomena yang menarik. Pertama, adanya kerjasama antara pimpinan militer dengan pengusaha keturunan China. Kedua, kompetisi antara pengusaha keturunan China dengan pengusaha pribumi dan yang ketiga, perusahaan-perusahaan negara yang berada di bawah pengaruh dan kontrol militer. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, para pimpinan militer melakukan kerjasama dengan pengusaha keturunan China. Beberapa Jendral memiliki perusahaan pribadi, dimana perusahaan tersebut dimodali oleh pengusaha-pengusaha keturunan China. Tidak hanya itu, militer juga memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Contohnya

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Aria W. Yudhistira, *Kapitalisme Semu: Penguasa Dan Pengusaha Di Indonesia*, dimuat dalam *Harian Seputar Indonesia*, 5 Agustus 2010.

dalam hal pemberian lisensi, keputusan tentang proyek dan memberikan persetujuan terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para birokrat.<sup>22</sup>

Melihat kondisi tersebut, jargon “politik sebagai panglima” yang selalu dikampanyekan pada masa Orde Lama tetap dipakai dalam bentuk lain pada masa pemerintahan Suharto. Kekuatan politik tetap menjadi sumber utama dalam rangka mencari keuntungan ekonomi dan penguasaan sumber-sumber ekonomi di Indonesia. Keadaan yang terjadi tersebut tentunya melahirkan pengusaha-pengusaha yang tidak mandiri karena mereka beroperasi dengan dukungan dan berada di bawah proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintah. Para pengusaha tersebut mempunyai patron dalam kelompok kekuasaan politik-birokrasi dan sangat tergantung kepada konsesi dan monopoli yang diberikan oleh pemerintah.<sup>23</sup>

Jika kondisi yang terjadi seperti itu, sangat sulit mengharapkan para pengusaha menjadi kelas menengah yang mandiri dan menjadi kekuatan politik alternatif. Alasan utamanya adalah kelompok menengah atau pengusaha yang ada merupakan perpanjangan tangan dari penguasa, sehingga mereka tidak bisa melakukan kritik ataupun oposisi, karena mereka hanyalah klien dari sebuah patron yaitu penguasa. Artinya, politisi dan pengusaha menjadi kekuatan untuk pembenaran dari setiap kebijakan yang dibuat oleh penguasa.<sup>24</sup>

---

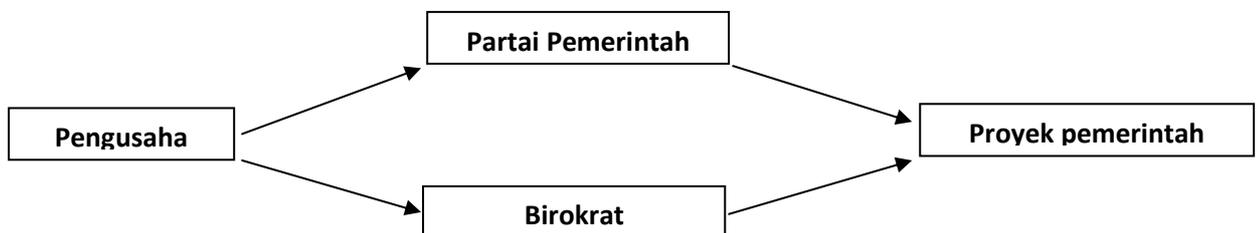
<sup>22</sup> Irwan Setiawan, *Korupsi Dalam Dimensi Sejarah* ([www.keretaunto.blogspot.com/11 Desember 2009](http://www.keretaunto.blogspot.com/11-Desember-2009)), diunduh dari ([www.keretaunto.blogspot.com](http://www.keretaunto.blogspot.com)), tanggal 11 Agustus 2011.

<sup>23</sup> Yahya Muhaimin, *op. cit.*

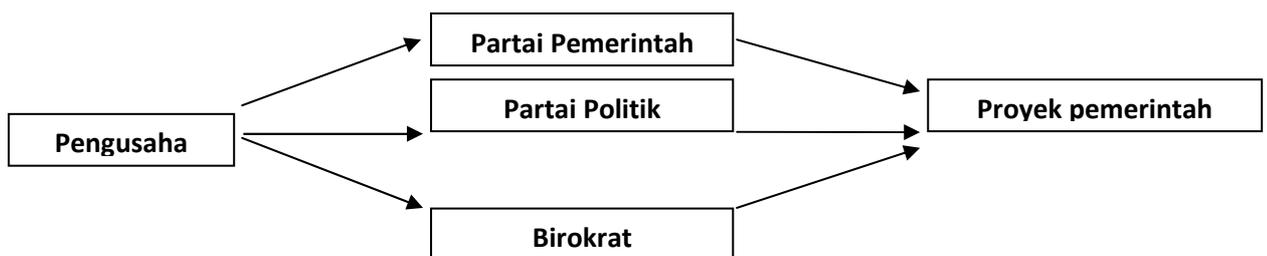
<sup>24</sup> *Ibid.*

Peristiwa masa lalu dalam pendekatan politik yang hendak dilihat adalah bagaimana aktivitas pengusaha dalam mencapai kekuasaan politik dan memberikan pengaruh kebijakan politik di tingkat lokal. Lokalitas yang dimaksud sesuai dengan konteks peristiwa yaitu wilayah geografis Sumatera Barat.

**Bagan 1. Hubungan Pengusaha, Partai Pemerintah Dan Birokrasi Pada Masa Orde Baru**



**Bagan 2. Hubungan Pengusaha, Partai Pemerintah, Partai Politik Dan Birokrasi Pada Masa Reformasi**



### **Bagan 3. Hubungan Politisi, Partai Politik, Birokrasi Dan Pengusaha Pada Masa Reformasi**



Pengusaha yang ada pada masa Orde Baru lebih banyak berafiliasi dengan partai pemerintah. Hubungan keduanya kemudian didukung oleh kekuatan birokrasi sehingga mempermudah pengusaha mendapatkan akses langsung terhadap pengerjaan proyek-proyek pemerintah. Pola ini kemudian berlanjut pada masa Reformasi, bedanya para pengusaha banyak mengisi struktur kepemimpinan partai-partai politik selain partai pemerintah. Pada masa Reformasi juga ditemukan beberapa kasus yang menarik, yaitu munculnya pengusaha-pengusaha dadakan. Pengusaha ini lahir karena memanfaatkan jabatan dan pengaruhnya serta mampu melihat peluang dari situasi ekonomi dan politik yang terjadi pada saat mereka berkuasa.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode sejarah yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode sejarah dapat dibagi dalam

empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>25</sup> Lebih jauh, Louis Gottschalk menjelaskan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau. Berbeda dengan Gottschalk, Nugroho Notokusanto mengatakan bahwa, metode sejarah ialah prosedur daripada kerja sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau.<sup>26</sup>

Heuristik merupakan tahapan pertama dalam metode sejarah. Heuristik secara singkat dapat diartikan sebagai tahapan dalam mencari dan mengumpulkan sumber-sumber atau informasi tentang masa lampau. Sumber-sumber dari penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan. Informan yang diwawancarai berasal dari anggota DPRD di Sumbar yang mempunyai latar belakang pengusaha. Rumusan pertanyaan menjadi suatu hal yang sangat penting supaya menghasilkan data yang objektif dan mendalam dari setiap informan yang diwawancarai.

Selain dari wawancara, studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Studi kepustakaan bertujuan untuk menghimpun dan mengumpulkan data-data primer dan data sekunder yang terkait dengan tema penelitian. Data-data tersebut berasal dari kliping koran, makalah-makalah, dokumen, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

---

<sup>25</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* ( Jakarta: UI Press, 1975), hlm. 50.

<sup>26</sup> Pendapat Nugroho Notokusanto dikutip oleh E. Kosim, lebih jauh lihat *Metode Sejarah; Asas dan Proses* (Bandung: UNPAD Press, 1983), hlm. 32.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan kritik sumber baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik intern merupakan proses penyeleksian data dengan menyelidiki kredibilitas sumber atau informasi agar bisa dipercayai, sedangkan kritik ekstern menyelidiki otentisitas sumber atau keaslian sumber.<sup>27</sup>

Kritik dari sumber ini bertujuan untuk mendapatkan kevalidan dari setiap data yang ditemukan di lapangan. Dari semua data-data yang diperoleh, lalu diinterpretasikan, kemudian dijelaskan dengan mencari hubungan sebab-akibat (kausalitas)<sup>28</sup> untuk mendapatkan suatu benang merah antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya dari kasus yang diteliti.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data dilakukan terhadap data primer maupun sekunder yang telah diperoleh. Setelah itu, yang harus dilakukan adalah melihat “benang merah” atas data yang telah ada, kemudian dituliskan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) sehingga didapatkan sebuah gambaran tentang keterlibatan pengusaha dalam dunia politik pada era reformasi di Sumatera Barat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan

---

<sup>27</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995), hlm 95.

<sup>28</sup> Louis Gottschalk, *op. cit.*

masalah, tujuan penelitian, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menggambarkan suasana Sumatera Barat sebelum Reformasi. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, pertama transformasi politik Sumatera Barat menuju Orde Baru. Kedua, membahas tentang perkembangan politik di Sumatera Barat masa Orde Baru, dan yang ketiga membahas tentang dunia usaha di Sumatera Barat.

Bab III membahas tentang pengusaha dan politik di Sumatera Barat pada masa reformasi. Sama halnya dengan bab II, pembahasan dalam bab III juga terdiri dari tiga sub bab. Pertama, pembahasan mengenai kondisi ekonomi Sumatera Barat pada era Reformasi. Kedua, membahas tentang kondisi politik Sumatera Barat pada era Reformasi, dan sub bab ketiga membahas tentang pengusaha dalam dunia politik di Sumatera Barat.

Bab IV membahas tentang profil singkat beberapa orang pengusaha yang aktif dalam dunia politik di Sumatera Barat. Dari profil singkat pengusaha tersebut, akan dapat dilihat latar belakang kehidupan pengusaha itu sebelum dan sesudah masuk ke dalam dunia politik. Selain itu, motif yang mendasari pengusaha untuk terjun ke dunia politik dapat dilihat pula secara jelas.

Bab V merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan gambaran secara umum tentang hasil dari penemuan-penemuan penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Persentuhan pengusaha dengan dunia politik sudah terjadi sejak zaman Orde Lama hingga berlanjut sampai sekarang. Beberapa kebijakan telah diterapkan oleh penguasa untuk membuat pengusaha di Indonesia menjadi lebih mandiri, tangguh serta mampu memajukan perekonomian Indonesia. Dalam kenyataannya yang terjadi justru semakin menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tidak hanya itu, perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha semakin memperburuk kondisi ekonomi dan politik di Indonesia.

Hubungan antara pengusaha dengan dunia politik tidak hanya terjadi di pusat saja, tetapi juga telah merambah ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Semenjak Orde Baru berkuasa, pengusaha-pengusaha di Sumatera Barat juga memainkan peranan yang cukup penting dalam perkembangan ekonomi maupun politik lokal di Sumatera Barat. Pada masa ini para pengusaha lebih banyak bercokol di dalam tubuh partai Golkar. Kalaupun ada di partai lain, kebanyakan dari mereka tidak berani “menampakan muka” pada masa itu. Ketakutan akan matinya usaha yang telah dirintis menjadi alasan yang kuat mengapa mereka melakukan hal tersebut. Pengusaha yang ada di Sumatera Barat pada masa Orde Baru lebih banyak tergabung ke dalam organisasi dan asosiasi pengusaha yang didirikan pada masa itu seperti KADIN, GAPENSI, APINDO. Tujuannya jelas, yakni mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah daerah dan berafiliasi kepada partai politik yang berkuasa pada waktu itu. Tidak

mengherankan apabila pengurus organisasi dan asosiasi tersebut juga menjadi pengurus teras partai Golkar di Sumatera Barat.

Setelah rezim Orde Baru runtuh, arus pengusaha untuk terjun ke dunia politik praktis semakin besar. Jika pada masa Orde Baru pengusaha lebih banyak menumpuk di partai Golkar, pada masa reformasi pengusaha lebih bebas dalam menentukan partai yang akan dimasukinya. Apalagi dengan diterapkannya sistem multi partai yang berlaku sejak reformasi, sangat menguntungkan bagi kalangan pengusaha. Dengan munculnya berpuluh-puluh partai maka peluang pengusaha untuk masuk dalam dunia politik semakin terbuka lebar. Besarnya ruang bagi kelompok pengusaha dalam dunia politik makin memperbesar peluang para pengusaha menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif. Mulai dari anggota DPRD hingga jabatan sebagai bupati, walikota hingga gubernur.

Sistem pemilihan langsung yang mulai diterapkan pada Pemilu 2004 serta pemilihan kepala daerah langsung tahun 2005, membuat kehadiran pengusaha semakin dibutuhkan oleh partai politik. Mahalnya ongkos pemilihan langsung dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kepengurusan partai semakin menguatkan peranan pengusaha di tubuh partai. Untuk daerah Sumatera Barat, keberadaan pengusaha memberikan warna lain dalam dinamika politik yang terjadi di daerah ini. Banyaknya pengusaha yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif maupun eksekutif membuktikan bahwa proses dinamika tersebut telah terjadi di Sumatera Barat.

Keberadaan pengusaha tentunya memberikan konsekuensi terhadap perkembangan ekonomi maupun politik di Sumatera Barat pada masa reformasi. Dalam bidang ekonomi, kecenderungan pengusaha untuk mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah tetap saja terjadi. Pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat maupun pengadaan barang-barang kebutuhan pemerintah daerah adalah contoh yang nyata dan biasanya tender tersebut dijalankan oleh pengusaha yang mempunyai akses langsung ke penguasa. Dalam bidang politik, adanya usaha untuk memperkaya diri sendiri melalui politik anggaran APBD serta adanya “perselingkuhan” antara anggota dewan dengan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang menguntungkan diri mereka masih saja terjadi pada era reformasi ini. Bahkan, yang lebih parahnya ada sebagian politisi yang beralih menjadi pengusaha di Sumatera Barat. Politisi-politisi tersebut disinyalir menggunakan pengaruh politik serta memanfaatkan jabatan yang didudukinya untuk menjadi pengusaha. Dengan kekuatan dan pengaruh jabatannya, politisi tersebut dapat dengan mudah memulai dan menjalankan suatu bisnis baru di Sumatera Barat.

Sistem pemilihan langsung dan perilaku politik massa yang bergantung pada politik uang (*money politics*) menyebabkan biaya politik para politisi semakin besar. Besarnya biaya dan modal politik itu berpengaruh pada sikap dan perilaku politik penguasa. Mereka cenderung berfikir bagaimana caranya mengembalikan modal politik yang sebelumnya telah terpakai dalam pemilu. Atas alasan itu maka tidak ada cara lain kecuali mencari celah untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah daerah. Selain itu, setelah mereka terpilih, hubungan mereka dengan

rakyat pun terputus. Ini terjadi karena mereka telah menganggap bahwa suara rakyat telah “dibeli” sehingga tidak ada lagi kepentingan untuk memperjuangkan aspirasi dan suara rakyat. Ketika suara telah dibeli maka tidak ada hubungan ideologis antara rakyat dengan penguasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Koran

*Media Indonesia*, 28 Juni 2005

*Singgalang*, 18 Februari 2011

*Seputar Indonesia*, 5 Agustus 2010

*Kompas*, 15 Oktober 2005

### B. Buku

Abdullah, Taufik dan Surjomihardjo, Abdurrachman. *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*. Jakarta: PT Gramedia, 1985.

Alfian, M. Alfian. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 2009.

A. Prambudi. *Kontroversi "Kudeta" Prabowo*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

Asnan, Gusti. *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Cipta Pustaka, 2006.

Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.

DR. J. Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta

Endang. S. Soesilowati, dkk. *Bisnis Dan Tingkat Lokal; Pengusaha, Penguasa Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Pilkada*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2007.

E. Kosim. *Metode Sejarah, Arah dan Proses*. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjajaran, 1983.

Habibie, B. Jusuf. 2006. *Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.

Herwandi, Zaiyardam Zubir (ed). *Menggugat Minangkabau*. Padang: Andalas University Press, 2006.

I Gde Widja. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Bandung: Angkasa, 1991.

J.H. Boeke. *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

- Iskandar, Israr. *Elit Lokal Pemerintah dan Modal Asing, Kasus Gerakan Menuntut Spin-off PT. Semen Padang dari PT. Semen Gresik Tbk 1999-2003*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2007.
- Kahin, Audrey. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Kartakusumah, Berliana. *Pemimpin Adiluhung, Genealogi Kepemimpinan Kontemporer*. Jakarta: Teraju Mizan, 2006.
- Keith, R. Legg. *Tuan, Hamba Dan Politisi*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Kuntowijoyo. *Metedologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara wacana Yogya, 2003.
- Mahrus Irsyam, Lili Romli (ed). *Menggugat Partai Politik*. Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik FISIPOL UI, 2003.
- Marbun, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- M. Rusli Karim. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Nurhasim, Moch dan Ikrar Nusa Bhakti. *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- ,ed. *Kualitas Keterwakilan Legislatif*. Jakarta: PPW LIPI, 2001.
- Pabottinggi, Mochtar. *Suara Waktu*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Rusvan, Fajar dan Irham. *Bang Saidal: Konsistensi Anak Zaman*. Jakarta: JC Institute, 2007.
- Saldi Isra. *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. Jakarta: PT. Gramedia, 2009.
- Sejarah Gapensi. Jakarta: Badan Pimpinan Pusat, Cetakan Kelima, 2008.
- Soemardjan, Selo (ed). *Kisah Perjuangan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Suryadinata, Leo. *Golkar Dan Militer; Studi Tentang Budaya Politik*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Winarno, Budi. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

Yahya. A. Muhaimin. *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES, 1991.

Yoshihara Kunio. *Kapitalisme Semu dan Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1991.

Zaiyardam Zubir, Eka Vidya Putra, Harry Efendi. *Gerakan Mahasiswa dan Otoritarianisme Negara, Sketsa Gerakan Mahasiswa Sumatera Barat (1958-1999)*. Jakarta: CPI, 2003.

Zed Mestika, Edy Utama, Hasril Chaniago. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Zon, Fadli. *Politik Huru-Hara Mei 1998*. Jakarta: IPS, 2009.

### C. Internet

Basri, Seta. *Sistem Pemilu di Indonesia* (<http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/>) diunduh dari (<http://setabasri01.blogspot.com>), tanggal 17 februari 2010.

Gumay, Hadar. *Sistem Pemilu 2009; Terbuka Tapi Sedikit (4)* (<http://news.okezone.com/23/02/2008>) diunduh dari (<http://news.okezone.com>), tanggal 17 Februari 2010.

Kelana Aries dan Haryadi, Rohmat. *Yang Makmur Di Pentas Politik* ([www.gatra.com/22-januari 2002](http://www.gatra.com/22-januari-2002)) diunduh dari ([www.gatra.com](http://www.gatra.com)), tanggal 17 februari 2010.

Nasir, Muhamad. *Tak Hanya Sumbar, Semua Daerah Menunggu Pilkada Berkualitas* ([www.cimbuak.net/19 Juli 2005](http://www.cimbuak.net/19-Juli-2005)), diunduh dari ([www.cimbuak.net](http://www.cimbuak.net)), tanggal 10 Juni 2011.

Setiawan, Irwan. *Korupsi Dalam Dimensi Sejarah* ([www.keretaunto.blogspot.com/11 Desember 2009](http://www.keretaunto.blogspot.com/11-Desember-2009)), diunduh dari ([www.keretaunto.blogspot.com](http://www.keretaunto.blogspot.com)), tanggal 11 Agustus 2011.

Z. Chaniago. *Peta Politik Sumbar Tak Kan Berubah Dalam Pemilu 2004* ([www.rantau-net.com/09 Februari 2004](http://www.rantau-net.com/09-Februari-2004)), diunduh dari ([www.rantau-net.com](http://www.rantau-net.com)), tanggal 22 Juni 2011.

Zed, Mestika. *PRRI Dalam Pergolakan Daerah Tahun 1950-an* ([www.nagari-nagarisaiber/17-03-2011](http://www.nagari-nagarisaiber/17-03-2011)), diunduh dari ([www.nagari-nagarisaiber](http://www.nagari-nagarisaiber)), tanggal 23 September 2011.

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

[www.kpu-sumbar.go.id](http://www.kpu-sumbar.go.id)

[www.pesisirselatan.go.id](http://www.pesisirselatan.go.id)

[www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id)

[www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)

[www.riaumandiri.us](http://www.riaumandiri.us)

#### **D. Makalah**

Syamsudin Haris. Pemilu 2004; Menggapai Indonesia Baru. *Makalah* ini disampaikan dalam Penghantar Seri Diskusi Publik Propatria di Jakarta tanggal 4 Februari 2004.

Bima Arya Sugiarto. Partai Politik dan Prospek Demokratisasi. *Makalah* ini disampaikan dalam training "School of Democracy: Nurcholish Madjid dan Demokrasi di Indonesia" tanggal 12-13 Desember 2007.

#### **E. Jurnal**

Lili Romli. "Kecenderungan Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada", dimuat dalam *Jurnal Poelitik* Vol.1 No.1 Tahun 2008.

Syafrizal. "Peran Ninik Mamak Dalam Perubahan Politik Di Sumatera Barat Pada Awal Orde Baru", dimuat dalam *Analisis Sejarah* Vol. I Nomor 2 Oktober 2010.

#### **F. Laporan Penelitian**

Zaiyardam Zubir, dkk. "Seputar Kasus Mark-up PT. Minang Malindo". *Laporan Penelitian*, Padang: 2002.